PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SHOLIKIN**
2. Jabatan : **ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**
3. NHK : **472402**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 1.200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/84 m2 di KAB / KOTA BONDOWOSO, Rp. 175.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/84 m2 di KAB / KOTA BONDOWOSO, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/84 m2 di KAB / KOTA BONDOWOSO, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/106 m2 di KAB / KOTA BONDOWOSO, HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000
5. Tanah Seluas 208 m2 di KAB / KOTA BONDOWOSO, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
6. Tanah Seluas 1.068 m2 di KAB / KOTA BONDOWOSO, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/77 m2 di KAB / KOTA BONDOWOSO, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 85.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU XENIA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 45P (BYSON) Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000

3. MOTOR, SUZUKI FW 110 SCD Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
4. MOTOR, YAMAHA SCP-2 SCORPIO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**28.550.000**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**----**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**103.728.938**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**1.417.278.938**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**30.377.558**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**1.386.901.380**

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.